



RENCANA KERJA (RENJA)

2025

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN FLORESTIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Rahmat dan tuntunan-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah Dokumen ini telah mengacu pada Rencana Pembanguna Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 13 Tahun 2022 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

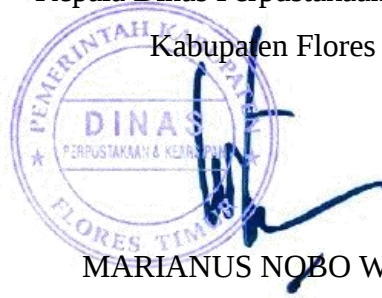
RENJA PD 2025 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur.

RENJA PD 2025 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA PD 2025 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan RENJA PD 2025

Larantuka, Juli 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Flores Timur



MARIANUS NOBO WATON, SE

NIP.19701208 199803 1 010

DAFTAR ISI

Hal

COVER	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Pendahuluan	
1.2.Landasan Hukum	
1.3.Maksud dan Tujuan	
1.4.Sistematika Penulisan	
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD T.A. 2025	
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur	
2.3.Isu – isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI Perangkat Daerah	
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.4.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023	
3.3.Program dan Kegiatan	
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)	
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur	
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Flores Timur	
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

Hal

Gambar 1.1. Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

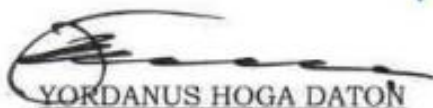
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

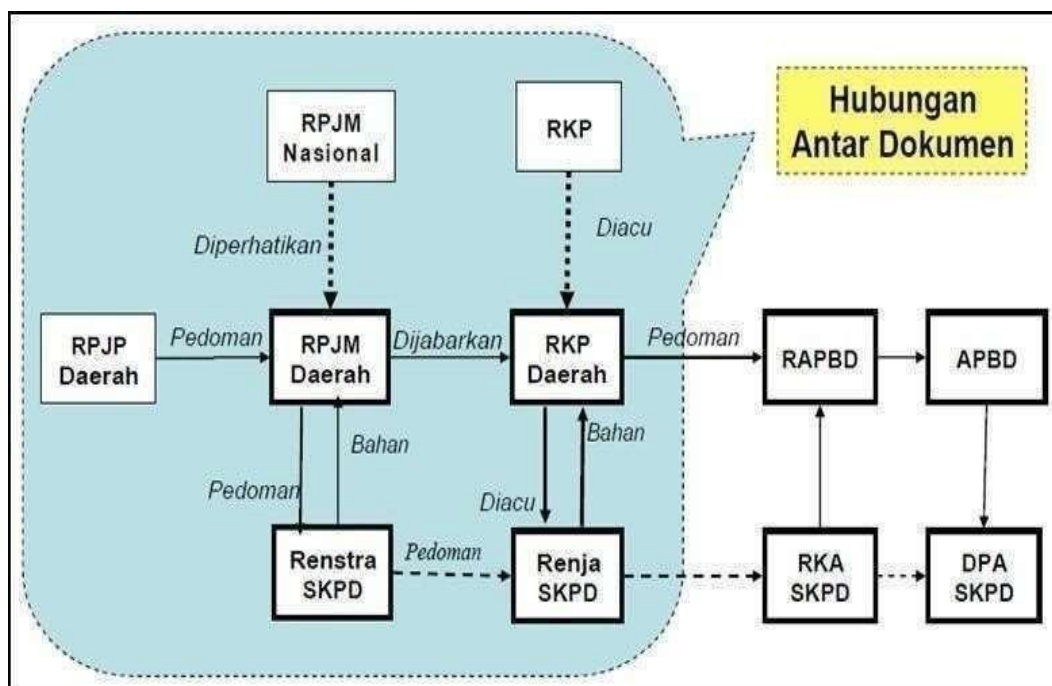
1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Berdasarkan bagan pada gambar tersebut maka terlihat sangat jelas hubungan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga memiliki hubungan yang erat dengan dokumen penganggaran karena Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah disusun mengacu pada Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturdan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 77 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur;
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 adalah :

- a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- b. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025
- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pada Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat secara detail gambaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan dan lokasi dalam rencana kerja tahun 2025.

BAB. V PENUTUP

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan 2023 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur

KODE					Sasaran	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RPD pada Tahun 2023 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Triwulan I s/d IV)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPD tahun 2023 s/d tahun 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6X100)		(9)=7/5 x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			11.530.904.068		3.310.325.014		2.853.311.208		86,19		24,74
x	xx	01			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9.665.769.411	100	2.415.705.366	48,00	2.252.971.544	48,00	93,26	48,00	23,31
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100		100		100	
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100		100		50		50		50	
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100		100		100	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	48,00	241.759.714	10,00	73.049.560	6,00	72.595.380	60,00	99,38	12,50	30,03
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	92,00	7.517.271.000	14,00	1.938.662.653	13,00	1.786.710.266	92,86	92,16	14,13	23,77
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik daerah pada SKPD (dok)	8,00	29.230.000	2,00	6.990.790	2,00	6.492.790	100,00	92,88	25,00	22,21
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (dok)	2,50	134.593.691	2,00	11.990.570	2,00	11.988.570	100,00	99,98	80,00	8,91

x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100,00	631.133.314	100,00	160.306.145	12,00	158.577.883	12,00	98,92	12,00	25,13
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	16,00	134.503.586	6,00	24.399.990	1,00	19.043.450	16,67	78,05	6,25	14,16
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	56,00	609.691.735	100,00	116.244.800	5,00	114.014.555	5,00	98,08	8,93	18,70
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	45,00	367.586.371	100,00	84.060.858	7,00	83.548.650	7,00	99,39	15,56	22,73
URUSAN PERPUSTAKAAN									986.785.136		741.410.405	24,00	448.082.090		60,44		45,41
2	23	02			Terwujudnya daya saing SDM	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	43,75	986.785.136	37,50	741.410.405	24,00	448.082.090	64,00	60,44	54,86	45,41
2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat	Persentase Pengelolaan Pepustakaan pada Tingkat Daerah (%)	50,00	438.659.681	15,16	248.914.840	21,00	248.223.715	138,52	99,72	42,00	56,59
2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca	Persentase pembudayaan Gemar Membaca (%)	50,00	548.125.455	15,33	492.495.565	3,00	199.858.375	19,57	40,58	6,00	36,46
URUSAN KEARSIPAN									878.349.521	30,17	153.209.243	6,00	152.257.574	19,89	99,38		17,33
2	24	02			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	cakupan pengelolaan kearsipan di daerah (%)	27,38	492.080.400	15,84	116.044.178	6,00	115.252.649	37,88	99,32	21,91	23,42
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota	Jumlah arsip dinamis daerah yang dikelola	161,00	307.109.041	81	85.599.513	5	85.057.984	6,17	99,37	3,11	27,70
2	24	02	2.02			Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota	Jumlah layanan kearsipan dan laporan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan	20,25	184.971.359	20	30.444.665	20	30.194.665	100,00	99,18	98,77	16,32
2	24	03				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	36,75	386.269.121	30	37.165.065	10,00	37.004.925	33,33	99,57	27,21	9,58
2	24	03	2.01			Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai,ditetapkan dan dimusnahkan	10	175.537.723	10	25.002.415	10	24.842.275	100,00	99,36	100	14,15
2	24	03	2.03			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/ Kota yang Digabung dan/ atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Jumlah daftar arsip daerah pemekaran yang dilakukan pendampingan dan penyelamatan	47,50	210.731.398	40	12.162.650	0	12.162.650	0	100	0	5,77

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pencapaian kinerja pada pada Tahun 2023 Program Pembinaan Perpustakaan 66,44, Program Pengelolaan Arsip 99,32 dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip realisasinya 99,57 dari target yang telah direncanakan.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur.

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023(thn n- 1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(9)	(11)	(11)	(12)
	Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
1	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	-	0,49	0,50	0,55	1,96	0,50	0,55	
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	-	45,65	46,11	50,84	49,76	46,11	50,84	
3	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	-	0,14	0,14	0,36	0,015	0,14	0,36	
4	Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Memiliki Sertifikat	-	4,39	4,44	4,89	10,50	4,44	4,89	
5	Jumlah Pengelola Kearsipan yang Memiliki Sertifikat	-	6,87	7,38	11,97	29,13	7,38	11,97	
6	Persentasi Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	-	20,59	23,06	20	20,69	23,06	20	

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang ada menunjukkan bahwa ada indikator memperoleh hasil yang belum optimal, yakni Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab pencapaian ini yakni ketersediaan perpustakaan yang belum seimbang dengan jumlah penduduk.

2.2. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatas menunjukkan bahwa ada indikator belum mencapai target. Adapun faktor yang menghambat pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan dan Kearsipan serta perbandingan SDM dan beban kerja yang kurang proporsional;
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Belum optimalnya penerapan sistem pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai standard;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar;
5. Meningkatkan Layanan Perpustakaan dan jaringan layanan perpustakaan ke seluruh wilayah kecamatan, desa/ kelurahan;
6. Perlu meningkatkan dukungan stakeholder, masyarakat dan aparat pemerintah Kel/ Desa untuk pembangunan Perpustakaan Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Rumah Ibadah/ Perpustakaan Khusus dan perpustakaan masyarakat;
7. Optimalisasi pemanfaatan Fungsi Perpustakaan dan Arsip oleh masyarakat.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur. Dikaitkan dengan sasaran pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026, maka tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung Tujuan Pembangunan Daerah yaitu ***Terwujudnya Daya Saing Daerah*** dengan sasaran ***Terwujudnya Daya Saing Sumber Daya Manusia*** dan mendukung tujuan ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*** dengan sasaran ***Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Flores Timur

Urusan	Bidan	Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Awal RKPD tahun 2025					Urusan	Bidan	Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
							Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
						(1)	(3)	(2)	(3)	(5)							(1)	(3)	(2)	(3)	(5)	
0						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.919.131.200	0						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.919.131.200	
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.692.177.372	2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.692.177.372	
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.900.171.102	2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.900.171.102	
2	23	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		2	23	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		
								Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)											Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			
								Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)											Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			
								Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)											Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			
2	23	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12,00	49.998.850	2	23	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12,00	49.998.850	
2	23	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	14.999.720	2	23	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	14.999.720	
2	23	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (Dok)	2	9.999.820	2	23	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (Dok)	2	9.999.820	

2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	5	9.999.760	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	5	9.999.760	
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	14.999.550	2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	14.999.550	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.092.400.011	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.092.400.011	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	2.003.580.511	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	12	2.003.580.511	
2	23	01	2.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	12	73.819.650	2	23	01	2.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	12	73.819.650	
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Lap)	2	14.999.850	2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Lap)	2	14.999.850	
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2	19.999.120	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2	19.999.120	
2	23	01	2.03	01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Larantuka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dok)	1	9.999.500	2	23	01	2.03	01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Larantuka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dok)	1	9.999.500	
2	23	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)	1	9.999.620	2	23	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)	1	9.999.620	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3	39.999.510	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3	39.999.510	
2	23	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen Penataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dok)	1	4.999.630	2	23	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen Penataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dok)	1	4.999.630	

2	23	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	1	9.999.880	2	23	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	1	9.999.880	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	25.000.000	2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	25.000.000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				155.290.406	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				155.290.406	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	2	21.999.013	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	2	21.999.013	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	14.053.000	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1	14.053.000	
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	2	12.993.698	2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	2	12.993.698	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	2	15.945.325	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	2	15.945.325	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan (paket)	2	14.999.670	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan (paket)	2	14.999.670	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	2	1.800.000	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	2	1.800.000	
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	1	14.999.880	2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	1	14.999.880	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	54.999.820	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	54.999.820	
2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)	1	3.500.000	2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)	1	3.500.000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				114.999.840	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				114.999.840	

2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan (unit)	1	35.000.000	2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan (unit)	1	35.000.000	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (unit)	3	59.999.840	2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (unit)	3	59.999.840	
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2	20.000.000	2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2	20.000.000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	143.396.290	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	143.396.290	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	2.790.900	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1	2.790.900	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	1	71.605.390	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	1	71.605.390	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	69.000.000	2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	69.000.000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				284.087.075	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				284.087.075	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	11	104.718.200	2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	11	104.718.200	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	6	55.000.000	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	6	55.000.000	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	84.368.875	2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	84.368.875	
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	40.000.000	2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	5	40.000.000	

URUSAN PERPUSTAKAAN									792.006.270	URUSAN PERPUSTAKAAN									792.006.270				
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	45,84		792.006.270	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	45,84		792.006.270	
2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota			-		320.000.390	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota			-		320.000.390	
2	23	02	2.01	04		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kab/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpuatakaan	Tersebar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	5		35.000.230	2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kab/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpuatakaan	Tersebar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	5		35.000.230	
2	23	02	2.01	11		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Tersebar	Jumlah Perpustakaan Yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kab/Kota Sesuai	6		72.000.000	2	23	02	2.01	11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Tersebar	Jumlah Perpustakaan Yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kab/Kota Sesuai Kewengannya (Perpustakaan)	6		72.000.000	
2	23	02	2.01	16		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Tersebar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota (orang)	30		37.000.260	2	23	02	2.01	16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Tersebar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota (orang)	30		37.000.260	
2	23	02	2.01	18		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Larantuka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Kebergaman	1000		100.999.900	2	23	02	2.01	18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Larantuka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Kebergaman Koleksi Perpustakaan (eksemplar)	1000		100.999.900	
2	23	02	2.01	08		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Larantuka	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1		75.000.000	2	23	02	2.01	08	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Larantuka	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1		75.000.000	
2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota					472.005.880	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota					472.005.880	
2	23	02	2.02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Tersebar	Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	16		77.005.880	2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Tersebar	Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	16		77.005.880	
2	23	02	2.02	02		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Larantuka	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	2		100.000.000	2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Larantuka	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	2		100.000.000	
2	23	02	2.02	03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Larantuka	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membacan tingkat kab/kota (orang)	24		100.000.000	2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Larantuka	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membacan tingkat kab/kota (orang)	24		100.000.000	

2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Tersebar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kab/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	8		100.000.000	2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Tersebar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kab/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	8		100.000.000	
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Duta baca tingkat daerah kab/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (orang)	1		95.000.000	2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kab/Kota	Larantuka	Jumlah Duta baca tingkat daerah kab/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (orang)	1		95.000.000	
URUSAN KEARSIPAN									226.953.828	URUSAN KEARSIPAN									226.953.828			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		cakupan pengelolaan kearsipan di daerah (%)	-		192.103.528	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		cakupan pengelolaan kearsipan di daerah (%)	-		192.103.528	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota					92.999.628	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota					92.999.628	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tersebar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (berkas)	140		40.000.000	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tersebar	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (berkas)	140		40.000.000	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Larantuka	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (berkas)	20		14.999.278	2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Larantuka	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (berkas)	20		14.999.278	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/ Kota	Tersebar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	1		38.000.350	2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/ Kota	Tersebar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	1		38.000.350	
2	24	02	2.02		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota		Jumlah layanan kearsipan dan laporan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan			99.103.900	2	24	02	2.02		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota		Jumlah layanan kearsipan dan laporan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan			99.103.900	
2	24	02	2.02	01	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN	Larantuka	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN (Pengguna)	5		49.103.900	2	24	02	2.02	01	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN	Larantuka	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/ Kota Melalui JIKN (Pengguna)	5		49.103.900	
2	24	02	2.02	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/ Kota	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota (Laporan)	1		50.000.000	2	24	02	2.02	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/ Kota	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota (Laporan)	1		50.000.000	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di	30,00		34.850.300	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	30,00		34.850.300	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					34.850.300	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					34.850.300	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Larantuka	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) tahun	10		34.850.300	2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Larantuka	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) tahun (Arsip)	10		34.850.300	

2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/ Kota yang Digabung dan/ atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan		Jumlah daftar arsip daerah pemekaran yang dilakukan pendampingan dan penyelamatan	40	49.421.764	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/ Kota yang Digabung dan/ atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan		Jumlah daftar arsip daerah pemekaran yang dilakukan pendampingan dan penyelamatan	40	49.421.764	
2	24	03	2.03	03	Pendampingan, Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	20	23.476.754	2	24	03	2.03	03	Pendampingan, Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	20	23.476.754	
2	24	03	2.03	04	Pendampingan, Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	20	25.945.010	2	24	03	2.03	04	Pendampingan, Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	20	25.945.010	

Jika dilihat dari rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak mengalami perubahan sebagaimana tabel 2.3 diatas.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan, kelompok masyarakat, dan dari OPD lain di Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dan kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		<i>Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)</i>		
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Dusun Lamakukung II Desa Dawata'a Kec. Adonara Timur		1 paket	DITOLAK (Desa Dawataa telah masuk dalam Lokasi Prioritas Titip Gulir Buku Tahun 2024)
		Desa Narasaosina Kec. Adonara Timur		1 paket	DITOLAK (Desa Narasaosina telah memperoleh bantuan 1000 Buku dari Perpustakaan Nasional Tahun 2024)
		Desa Wureh Kec. Adonara barat		1 paket	DITOLAK (Desa Wureh telah memperoleh bantuan 1000 Buku dari Perpustakaan Nasional
		Sekolah SDK Ipi Ebang dan Desa Lelenbala Kec. Adonara Timur		1 paket	DITOLAK (Desa Lelenbala telah masuk dalam Lokasi Prioritas Titip Gulir Tahun 2024, sedangkan khusus untuk sekolah belum dilayani sebab keterbatasan buku khusus untu anak usia Pendas, untuk sementara waktu memanfaatkan perpustakaan desa
		Anak sekolah SD dan SMP di Desa Boru Kec. Wulanggitang		1 paket	DITOLAK (khusus untuk sekolah belum dilayani sebab keterbatasan buku untuk anak usia Pendas, untuk sementara waktu memanfaatkan perpustakaan desa Boru yang telah tersedia buku bantuan dari Perpustakaan Nasional)
		Kelurahan Larantuka Kec. Larantuka		1 paket	DITERIMA

	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Desa Watotutu Kec. Ile Mandiri	Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	1 paket	DITERIMA
		Dusun Kolidatang Desa Kolaka Kec. Tanjung Bunga		1 paket	DITERIMA
		Desa Lamawai, Kec. Solor Timur		1 lokus	DITERIMA
		Kelurahan Ritaebang Kec. Solor Barat		1 lokus	DITOLAK (Kel. Ritaebang telah memperoleh bantuan 1000 Buku dari Perpustakaan Nasional Tahun 2024)
		Desa Daniwato, Kec. Solor Barat		1 lokus	DITERIMA
		Desa Kenere, Kec. Solor Selatan		1 lokus	DITERIMA
		Desa Wulublolong Ke. Solor Timur		1 lokus	DITOLAK (Desa Wulublolong Wulublolong telah memperoleh bantuan TPBIS Tahun 2021 dan bantuan 1000 Buku dari Perpustakaan Nasional , Taman Baca Masyarakat Wulublolong telah memperoleh bantuan 1000 Buku dari Perpustakaan Nasional Tahun 2024)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usulan masyarakat sebanyak 13 usulan, yang diterima 6 usulan yakni kegiatan pembudayaan gemar membaca.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional RI

1. Peningkatan gemar membaca, dengan strategi :
 - a) Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - b) Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan;
 - c) Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat;
 - d) Meningkatkan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.
2. Pengembangan koleksi Indonesia yang lengkap dan mutakhir, dengan strategi :
 - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan
 - b) Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan adat, berbagai komunitas dan perorangan (ahli) untuk membangun komunitas budaya lokal.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, dengan strategi :
 - a) Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan
 - b) Meningkatkan kerjasama antar jejaring perpustakaan

B. Arah Kebijakan dan Strategi ANRI

1. Kebijakan Kearsipan

Kebijakan kearsipan sebagai landasan dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang meliputi :

- a) Pengembangan NSPK sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui penyusunan peraturan di bidang kearsipan di kementerian/ lembaga (pusat) dan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota;
- b) Penyusunan NSPK sebagai amanat UU nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang berimplikasi pada kementerian/ lembaga (pusat) dan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota yang menyangkut 10 area yaitu : (1) Pembinaan; (2) Pengelolaan Arsip; (3) Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); (4) Organisasi; (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (6) Prasarana dan Sarana Kearsipan; (7) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; (8) Sosialisasi Kearsipan; (9) Kerja Sama; (10) Pendanaan.

2. Pembinaan Kearsipan

Dalam rangka meningkatkan kemajuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu :

- a) Penguatan dan penataan lembaga kearsipan, yang meliputi penguatan dan penataan secara struktural unit kearsipan pada kementerian/ lembaga, lembaga kearsipan daerah dan perguruan tinggi; serta penguatan peranan dan fungsi unit dan lembaga kearsipan pada kementerian/ lembaga dan daerah serta perguruan tinggi;
- b) Penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis TIK;
- c) Pengembangan sarana dan prasarana kearsipan melalui standarisasi gedung, peralatan dan sistem jaringan kearsipan;
- d) Jaringan strategis dan koneksi dengan unit dan lembaga kearsipan;
- e) Peran dan partisipasi masyarakat menuju sadar arsip;

- f) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen arsip dinamis dan statis.

3. Pengelolaan Arsip

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang – undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis yang baik dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Sedangkan pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Lebih lanjut dipertegas oleh pasal 41 butir (1) bahwa pencipta arsip sebagaimana pasal 40 ayat (2) pencipta arsip dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Daerah. Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan sasaran Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025 (%)
1	Meningkatnya Daya Saing SDM	Terwujudnya Daya Saing SDM	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan	41,67
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pengelolaan Kearsipan di Daerah	16,15
			Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	30

3.3. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rancangan Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur dalam Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur 2023 – 2026 yang terfokus pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah .

Rencana Kerja Tahun 2025 khusus pada program urusan perpustakaan dan urusan kearsipan meliputi 3 Program, 6 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan, yang mana untuk urusan bidang perpustakaan sebagian besar kegiatan dilaksanakan tersebar pada beberapa desa/kecamatan dan kegiatan bidang kearsipan tersebar pada OPD dan desa/kecamatan, dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp. 855.350.00,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Urusan	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0,2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.526.015.000				3.477.720.021
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			0	3.341.165.000				2.606.685.852
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.670.665.000				2.606.685.852
2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100				100	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100				100	
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)		100				100	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100				100	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.000.000				61.160.000
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	Larantuka	3	20.000.000	BBNKB		2	21.500.000

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka	2	10.000.000	BBNKB		2	15.200.000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	Larantuka	5	12.000.000	BBNKB		5	12.110.000
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Larantuka	3	10.000.000	BBNKB		3	12.350.000
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.017.165.000				2.028.250.000
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	Larantuka	14	1.930.845.000	BBNKB		14	1.950.000.000
2	23	01	2.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	Larantuka	12	73.820.000	BBNKB		12	65.000.000
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Larantuka	2	12.500.000	BBNKB		2	13.250.000
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				15.000.000				17.000.000
2	23	01	2.03	01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dok)	Larantuka	1	5.000.000	BBNKB		1	5.500.000

2	23	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)	Larantuka	1	10.000.000	BBNKB		1	11.500.000
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000				28.799.630
2	23	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dok)	Larantuka	1	5.000.000	BBNKB		1	4.999.630
2	23	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	1	5.000.000	BBNKB		1	3.500.000
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Larantuka/ OPD/ Luar Wilayah	2	25.000.000	BBNKB		2	20.300.000
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.600.000				144.525.000
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	Larantuka	2	2.000.000	BBNKB		2	2.200.000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Larantuka	1	4.500.000	BBNKB		1	7.500.000
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Larantuka	2	5.000.000	BBNKB		1	7.000.000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Larantuka	2	20.000.000	BBNKB		2	16.225.000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	Larantuka	2	16.800.000	BBNKB		2	17.600.000
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Larantuka	2	1.800.000	BBNKB		2	2.000.000

2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	Larantuka	1	15.000.000	BBNKB	1	15.000.000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Dalam dan Luar Wilayah Kab. Flotim	2	50.000.000	BBNKB	2	72.000.000
2	23	01	2.06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)		1	3.500.000	BBNKB	1	5.000.000
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.000.000			44.150.000
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unut kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan(unit)	Larantuka	1	35.000.000	BBNKB	0	0
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (unit)	Larantuka	3	35.000.000	BBNKB	2	24.150.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Larantuka	2	20.000.000	BBNKB	2	20.000.000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.500.000			153.401.222
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Larantuka	1	1.500.000	BBNKB	1	6.401.222
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	Larantuka	1	70.000.000	BBNKB	1	23.000.000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Larantuka	12	69.000.000	BBNKB	12	124.000.000

2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.400.000				129.400.000
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya</i>	Larantuka	11	100.000.000	BBNKB		6	87.900.000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)</i>	Larantuka	6	5.000.000	BBNKB		3	6.500.000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang (Unit)</i>	Larantuka	1	80.400.000	BBNKB		1	15.000.000
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / di Rehabilitasi</i>		5	17.000.000	BBNKB		3	20.000.000
URUSAN PERPUSTAKAAN									670.500.000				632.675.000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)</i>		45,84	670.500.000				632.675.000
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota				240.500.000				197.225.000
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kab/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	<i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)</i>	Kec.Tanjung Bunga	5	30.500.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan		5	35.500.000
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/ Kota	<i>Jumlah Perpustakaan Yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kab/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)</i>	Desa Horinara,Desa Halakodanuan, Desa narasaosina, Desa Bantala, Desa Dunnana Lewoi Ingu, Kelurahan Pohon Sirih	6	50.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan		3	37.640.000

2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/ Kota	<i>Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota (orang)</i>	<i>Kec.Larantuka</i>	30	35.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	20	33.085.000
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	<i>Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan (eksemplar)</i>	<i>Larantuka</i>	1.000	50.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	140	51.000.000
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Management Layanan TIK</i>	<i>Larantuka</i>	1	75.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	1	40.000.000
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota				430.000.000			435.450.000
	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat daerah Kabupaten / Kota Yang dipilih dan didukung Kegiatannya</i>		1	95.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	1	52.000.000
	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	<i>Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kab/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)</i>	<i>Desa Duntana Lewo Ingu, Desa Pledo, Desa Wulublolong, Desa Bantala, Desa Boru, Desa Sinamalaka, Desa Lewoloba, Desa Replikasi</i>	8	90.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	8	92.000.000

2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Larantuka	2	100.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	1	110.000.000
	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membacakan tingkat kab/kota (orang)	Larantuka	24	75.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	24	110.000.000
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	TITI GULIR :Desa Lelenbala,Desa Narasaosina,Dawataa,Karingl amalouk,Kiwang Ona,Lewobunga,Mokantarak,Rutan larantuka,Polres Flotim, Kel Balela,Desa Daniwato,Desa Kenere,Desa Lamawai,Kel. Larantuka, Desa Watotutu,Desa Kolaka LAYANAN MPK : Sekolah dalam wilayah daratan Flotim	16	70.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	8	71.450.000

URUSAN KEARSIPAN								184.850.000				238.359.169
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>cakupan pengelolaan kearsipan di daerah (%)</i>			130.000.000		50	142.420.147
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota				65.000.000			73.920.147
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (berkas)	(19 Kecamatan)	140	30.000.000	DAU	140	32.125.000
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (berkas)	Larantuka	20	15.000.000	DAU	20	16.500.000
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	OPD/ Kabupaten Flores Timur	1	20.000.000	DAU	1	25.295.147
2	24	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota				65.000.000			68.500.000
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN		5	25.000.000	DAU	5	26.500.000
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kerasipan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota (Laporan)	Kec.Solor Timur	1	40.000.000	DAU	1	42.000.000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<i>Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)</i>		40	54.850.000		50	95.939.022
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			20	34.850.000		10	36.000.000
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) tahun (Arsip)	Larantuka, Kab. Flores Timur	10	34.850.000	DAU	10	36.000.000

2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				20.000.000				59.939.022
2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan</i>	<i>Larantuka, Kab. Flores Timur</i>	20	10.000.000	DAU		20	22.992.374
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan</i>	<i>Larantuka, Kab. Flores Timur</i>	20	10.000.000	DAU		10	36.946.648

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Urutan	Bidang Urutan/Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0,2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.526.015.000		
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			0	3.341.165.000		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.670.665.000		
2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100			
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100			
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)		100			
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100			
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.000.000		
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	Larantuka	3	20.000.000	BBNKB	

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Larantuka	2	10.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	Larantuka	5	12.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Larantuka	3	10.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.017.165.000		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	Larantuka	14	1.930.845.000	BBNKB	
2	23	01	2.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	Larantuka	12	73.820.000	BBNKB	
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Larantuka	2	12.500.000	BBNKB	
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				15.000.000		
2	23	01	2.03	01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dok)	Larantuka	1	5.000.000	BBNKB	

2	23	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)</i>	Larantuka	1	10.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000		
2	23	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Penataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dok)</i>	Larantuka	1	5.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	Larantuka	1	5.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Larantuka/ OPD/ Luar Wilayah	2	25.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.600.000		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)</i>	Larantuka	2	2.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)</i>	Larantuka	1	4.500.000	BBNKB	
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)</i>	Larantuka	2	5.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i>	Larantuka	2	20.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)</i>	Larantuka	2	16.800.000	BBNKB	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Larantuka	2	1.800.000	BBNKB	
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)</i>	Larantuka	1	15.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	Dalam dan Luar Wilayah Kab. Flotim	2	50.000.000	BBNKB	

2	23	01	2.06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)		1	3.500.000	BBNKB	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.000.000		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unut kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan(unit)	Larantuka	1	35.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (unit)	Larantuka	3	35.000.000	BBNKB	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Larantuka	2	20.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.500.000		
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Larantuka	1	1.500.000	BBNKB	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	Larantuka	1	70.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Larantuka	12	69.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.400.000		
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	Larantuka	11	100.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	Larantuka	6	5.000.000	BBNKB	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang (Unit)	Larantuka	1	80.400.000	BBNKB	

2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / di Rehabilitasi		5	17.000.000	BBNKB	
URUSAN PERPUSTAKAAN									670.500.000		
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)		45,84	670.500.000		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota				240.500.000		
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kab/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Kec.Tanjung Bunga	5	30.500.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kab/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	Desa Horinara,Desa Halakodanuan, Desa narasaosina, Desa Bantala, Desa Dunnana Lewoi Ingu, Kelurahan Pohon Sirih	6	50.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota (orang)	Kec.Larantuka	30	35.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	

2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	<i>Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan (eksemplar)</i>	Larantuka	1.000	50.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Management Layanan TIK</i>	Larantuka	1	75.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota				430.000.000		
	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat daerah Kabupaten / Kota Yang dipilih dan didukung Kegiatannya</i>		1	95.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	
	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	<i>Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kab/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)</i>	<i>Desa Duntana Lewo Ingu, Desa Pledo, Desa Wulublolong, Desa Bantala, Desa Boru, Desa Sinamalaka, Desa Lewoloba, Desa Replikasi</i>	8	90.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</i>	Larantuka	2	100.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	

	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	<i>Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membacan tingkat kab/kota (orang)</i>	Larantuka	24	75.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)</i>	<i>TITI GULIR</i> :Desa Lelenbala,Desa Narasaosina,Dawataa,Karinglamalouk,Kiwang Ona,Lewobunga,Mokantarak,Rutan larantuka,Polres Flotim, Kel Balela,Desa Daniwato,Desa Kenere,Desa Lamawai,Kel. Larantuka, Desa Watotutu,Desa Kolaka	16	70.000.000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	
							LAYANAN MPK : Sekolah dalam wilayah daratan Flotim			DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	

URUSAN KEARSIPAN									184.850.000		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	cakupan pengelolaan kearsipan didaerah (%)			130.000.000		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota				65.000.000		
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (berkas)	(19 Kecamatan)	140	30.000.000	DAU	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (berkas)	Larantuka	20	15.000.000	DAU	
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	OPD/ Kabupaten Flores Timur	1	20.000.000	DAU	
2	24	02	2.03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota				65.000.000		
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN		5	25.000.000	DAU	
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kerasipan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota (Laporan)	Kec.Solor Timur	1	40.000.000	DAU	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)		40	54.850.000		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			20	34.850.000		

2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) tahun (Arsip)</i>	<i>Larantuka, Kab. Flores Timur</i>	10	34.850.000	DAU	
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				20.000.000		
2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan</i>	<i>Larantuka, Kab. Flores Timur</i>	20	10.000.000	DAU	
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan</i>	<i>Larantuka, Kab. Flores Timur</i>	20	10.000.000	DAU	

BAB V

PENUTUP

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 yang menitikberatkan pada pencapaian pelayanan perpustakaan dan penguatan perpustakaan desa yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial serta pencapaian pengelolaan kearsipan dinamis daerah dan penyelamatan arsip daerah.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Juli 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Flores Timur,



MARIANUS NOBO WATON, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701208 199803 1 010